

PERAN PETINGGI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KAMPUNG LINGGANG AMER KECAMATAN LINGGANG BIGUNG KABUPATEN KUTAI BARAT

Ucok Manalu¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan mendeskripsikan peran petinggi dalam pemberdayaan masyarakat dan mengidentifikasi apa saja yang menjadi faktor-faktor pendukung dan penghambat peran petinggi dalam pemberdayaan masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, penelitian lapangan berupa observasi, wawancara mendalam dan penelitian dokumentasi. Narasumber dari penelitian ini adalah petinggi linggang amer, sekretaris kampung, ketua badan permusyawaratan kampung dan juga tokoh masyarakat. analisis data digunakan adalah model interaktif dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran petinggi dalam pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan pengetahuan warga melalui penyuluhan pertanian dan juga menerapkan teknologi tepat guna pertanian, memberikan arahan kepada lembaga kemasyarakatan kampung agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai mitra petinggi dalam pemberdayaan masyarakat, namun belum ada upaya dari petinggi memberdayakan masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup, faktor pendukung peran petinggi adalah tingginya partisipasi masyarakat dan adanya dukungan dari pemerintah kabupaten, yang menjadi faktor penghambat adalah rendahnya sumber daya manusia aparatur kampung serta terbatasnya anggaran.

Kata Kunci: *Peran, petinggi, pemberdayaan, masyarakat*

Pendahuluan

Sebagai landasan, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi. Kemudian Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2006 ini juga menjelaskan pengertian sebutan kampung dan petinggi di kutai barat yaitu Dalam pasal 1 bagian 7 menjelaskan pengertian kampung, kampung adalah sebuah kampung dalam bahasa umum penduduk dilingkungan Kabupaten Kutai Barat, jadi kampung disini berarti adalah sebuah kampung dalam bahasa yang

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ucokmanalu3@gmail.com

umum dipergunakan penduduk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Dan Pasal 1 bagian 11 menjelaskan pengertian petinggi, petinggi adalah sebutan kepala kampung dalam bahasa asli penduduk di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat, jadi petinggi disini adalah kepala kampung dalam bahasa yang umum dipergunakan penduduk di lingkungan pemerintah, kemudian penjelasan kampung dalam Peraturan Daerah Kutai Barat Nomor 16 tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan dan Penetapan Peraturan Kampung pasal 1 ayat 7 kampung adalah sebuah kampung dalam bahasa yang umum dipergunakan penduduk di lingkungan Kabupaten Kutai Barat. Kemudian Peraturan Daerah Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Organisasi Tata Kerja dan Kedudukan Keuangan Petinggi dan Kewenangan Perangkat Kampung. menjelaskan pengertian petinggi pasal 1 ayat 10 petinggi adalah sebutan kepala kampung dalam bahasa yang umum dipergunakan penduduk di lingkungan Kabupaten Kutai Barat.

dari tugas petinggi seperti tersebut di atas, maka petinggi mempunyai peranan dan tanggung jawab yang sangat berat karena selain menyelenggarakan urusan pemerintahan, petinggi juga merangkap sebagai pengusaha tunggal di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk mencapai tujuan pemerintah kampung dalam hal pemberdayaan masyarakat maka diperlukan kerja sama antara pemimpin dan masyarakat yang dalam hal ini diharapkan peran aktif dari masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Karena dalam proses pemberdayaan masyarakat, masyarakat kampung ditempatkan dalam posisi ganda yakni sebagai subyek dan obyek pemberdayaan masyarakat. Sebagai subyek pemberdayaan masyarakat, masyarakat kampung memiliki tanggung jawab untuk memberikan partisipasi dan kontribusinya dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Sedangkan sebagai obyek program pemberdayaan, masyarakat kampung memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dari hasil dan kemajuan yang dicapai dari proses pemberdayaan masyarakat. Dalam usaha pemberdayaan masyarakat tersebut sangat diperlukan kerja sama antara pemimpin dan yang dipimpin. Pemimpin formal itu perlu melakukan komunikasi dan pembinaan serta penyuluhan kepada masyarakat yang berada di kampung. Agar program pemerintah efektif maka perlu adanya Kepemimpinan petinggi dalam mengarahkan dan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi baik dalam hal Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan Kampung.

dari observasi yang peneliti lakukan di kampung linggang amer Petinggi belum berperan menjalankan kewajibannya dalam pemberdayaan masyarakat seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung melalui pemberdayaan hal ini berdampak pada masih rendahnya pendapatan masyarakat, sulitnya mengakses pendidikan kejenjang lebih tinggi, sulitnya mendapatkan pelayanan kesehatan, dan masyarakat belum bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Petinggi juga belum banyak berperan dalam memberdayakan lembaga kemasyarakatan di kampung seperti pemberdayaan karang taruna, PKK, LPM, dan lembaga Adat

kampung. hal ini menyebabkan minimnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari adanya lembaga-lembaga kemasyarakatan kampung tersebut. petinggi juga dalam memberdayakan masyarakat belum memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di kampung hal ini menyebabkan potensi yang ada di kampung belum dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pemanfaatan sumber daya alam untuk mengembangkan perkebunan, pertanian dan peternakan di kampung.

Dari berbagai permasalahan pemberdayaan masyarakat diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Peran Petinggi Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Linggang Amer Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat”

Kerangka Dasar Teori

Peran

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia (2005:854) peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.

Peran menurut May Rudy dalam Prasadja (2006:137) berpendapat bahwa peran dapat diartikan sebagai orientasi dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam posisi sosialnya. Peran merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dari perilaku yang dapat berwujud sebagai per orang sampai dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran baik perilaku yang bersifat individual maupun jamak dapat dinyatakan sebagai struktur. Struktur yang terdapat dalam organisasi memiliki fungsi-fungsi yang harus mereka jalani agar tercapai tujuan dari peran pembentukan organisasi tersebut, dan apabila semua fungsi tersebut telah berjalan dengan baik, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan baik, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah menjalankan perannya.

Tidak jauh berbeda dari pendapat May Rudy menurut Soejono Soekanto (2012:212) menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan.

Petinggi

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang kampung disebutkan bahwa Petinggi bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Kampung, melaksanakan Pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung, oleh karena itu Petinggi mempunyai peran dan juga kedudukan yang sangat penting dalam Pemerintahan Kampung. Ia

merupakan pemimpin terhadap jalannya roda pemerintahan pemerintahan yang ada di Kampung.

Menurut pendapat Saparin dalam Hanif Nurcholiz (2011:9) Petinggi adalah penguasa tunggal di dalam pemerintahan kampung, bersama-sama dengan pembantunya dan ia merupakan pamong kampung dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan rumah tangga kampung, di samping itu ia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan.

Pendapat yang sama diungkapkan Widjaja (2008:27) Petinggi yaitu penguasa tertinggi di kampung dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setiap waktu berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinya

Dari dua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Petinggi sebagai kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan kampung yang baik karena dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan kampung tersebut, Petinggi adalah yang paling memegang peranan dalam masyarakat yang menjadi wakil rakyat yang terpilih dan dipilih secara langsung oleh masyarakat kampungnya.

Persyaratan Petinggi

Adapun yang menjadi persyaratan petinggi menurut undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang kampung adalah:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Petinggi ;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Kampung setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat;
- l. tidak pernah sebagai Petinggi selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan

m. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Wewenang petinggi

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Petinggi berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Kampung;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Kampung;
- d. menetapkan Peraturan Kampung;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
- f. membina kehidupan masyarakat Kampung;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Kampung;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Kampung serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kampung;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Kampung;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Kampung;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Kampung secara partisipatif;
- n. mewakili Kampung di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak petinggi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud undang-undang nomor 6 Tahun 2014 pada ayat (1), Petinggi berhak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Kampung;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Kampung;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Kampung.

Kewajiban Petinggi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 6 Tahun 2014 pada ayat (1), Petinggi berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta

- mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Kampung;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Kampung yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Kampung;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Kampung yang baik;
 - i. mengelola Keuangan dan Aset Kampung;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kampung;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Kampung;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Kampung;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Kampung;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Kampung;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat Kampung.

Pertanggung Jawaban Petinggi

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 6 Tahun 2014, Petinggi wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Kampung setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Kampung setiap akhir tahun anggaran.

Pemberdayaan

Whiratnolo dan Dwidjowidjoto (2007:1-2) mengatakan pemberdayaan dalam bahasa inggris yaitu *Empowerment*. *Empowerment* berasal dari kata *Power* yang berarti kuasa. Oleh sebabitu *Empowerment* berarti pemberian kekuasaan. Dalam bahasa Indonesia, pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti mapu, namun dalam konteks ini, pemberdayaan lebih berarti mempunyai kuasa terhadap suatu hal.

Menurut Payne (2007:266) yang mengungkapkan bahwa suatu pemberdayaan, pada intinya ditunjukan guna, membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan mereka lakukan terkait dengan diri mereka, termaksud mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungan.

Masyarakat

Ralph Lintoln dalam abdulsyani (2007:14) myatakan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah hidup dan berkerjasama dalam waktu yang cukup lama sehingga mereka telah dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri sendiri sebagai kekuatan sosial dengan batas-batas yang mereka rumuskan denga jelas.

Hasan Shadily (2007:47) mengatakan bahwa masyarakat adalah besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau kerena sendirinya bertalian secara golongan dan mempengaruhi satu sama lain.

Pemberdayaan Masyarakat

Harry Hikmat (2004:217) mengungkapkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana menggali dan mendayagunakan sumberdaya yang ada di masyarakat. Karena masyarakat memiliki banyak potensi baik dilihat dari luar, dari sumber-sumber daya alam yang ada, maupun dari sumberdaya sosial budaya masyarakat. Masyarakat memiliki kekuatan yang apabila digali dan disalurkan akan berubah menjadi energy yang besar untuk mengatasi masalah yang mereka alami.

Menurut suhendra (2005:75) pemberdayaan masyarakat dapat diartikan bahwa masyarakat diberi kuasa, dalam upaya untuk menyebarkan kekuasaan, melalui pemberdayaan masyarakat, organisasi agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya untuk semua aspek kehidupan politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pengelolaan lingkungan dan sebagainya

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memaparkan dan bertujuan memberikan gambaran serta menjelaskan dari variabel yang diteliti. Menurut Moleong (2003:6) mengemukakan bahwa deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.

Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Peran petinggi kampung dalam pemberdayaan masyarakat dalam:

- a. Memberdayakan masyarakat
 - b. Memberdayakan lembaga kemasyarakatan di kampung
 - c. Melestarikan lingkungan hidup
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat peran petinggi kampung dalam pemberdayaan masyarakat.

Sumber Data

Menurut Arikunto (2006:129) yang dimaksud dengan sumber data adalah subjek darimana data dapat di peroleh. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sebagai berikut :

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang akan diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang akan diteliti. Data primer penulis peroleh dari nara sumber atau informan dengan cara melakukan tanya jawab atau wawancara secara langsung dipandu melalui pedoman wawancara sesuai dengan fokus penelitian yang penulis teliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua teknik dalam menentukan informan yaitu teknik *Purposive Sampling* dan teknik *Snowball Sampling*.

Purposive Sampling menurut Sugiono (2010:85) adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini yaitu orang yang dianggap paling tau tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang akan diteliti.

Selanjutnya *Snowball Sampling* menurut Sugiono (2010:85) adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak.

Purposive Sampling digunakan untuk narasumber yang terdiri dari *Key Informant* dan *Informant*.

- 1) *Key Informant* (Informan Kunci)

Dalam penelitian ini penulis menentukan yang menjadi *key informant* adalah Petinggi Kampung Linggang Amer Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat.

- 2) *Informant*

Untuk melengkapi data yang diperlukan, maka diperlukan juga informasi-informasi dipihak lain sehingga data yang didapat lebih valid dan lengkap. Informan dalam penelitian ini yakni : Sekretaris Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Kampung, Tokoh Masyarakat, Masyarakat.

2. Data Sekunder

Menurut Nasution (2007:250), bahan bacaan disebut sebagai data sekunder. Sumber sekunder bersifat pribadi antara lain berupa surat, kitap harian, catatan biografi, dokumentasi perkumpulan, organisasi, perusahaan. Sumber ini sering tidak diketahui umum atau peneliti. Jadi penulis hanya bisa melihat, mendengar membaca dokumen dan buku-buku yang mendukung penelitian, sebatas yang mampu ditangkap, namun mendekati kebenaran yang diinginkan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian ini adalah mendapatkan data yang diperlukan guna mencapai tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Dengan itu pula maka penulis menggunakan beberapa cara atau teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut :

1. *Library Research* (penelusuran kepastakaan) yaitu menggunakan studi kepastakaan melalui buku-buku atau literature yang memuat tentang teori-teori yang ada kaitannya dengan penelitian guna mendukung penulisan dan pembahasan skripsi ini yaitu proses pengambilan data dalam penelitian dimana peneliti atau pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.
2. *Field Work Research* (penelitian lapangan) yaitu mengadakan penelitian langsung pada objek atau pengambilan data di lapangan dengan menggunakan teknik-teknik antara lain :
 - a. *Observasi*, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung kepada objek penelitian.
 - b. Wawancara, yaitu mengadakan wawancara dengan informan untuk melengkapi keterangan-keterangan yang ada hubungannya dengan penelitian skripsi.
 - c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang berkaitan.

Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis interaktif yaitu menganalisis data sekunder kemudian menarik kesimpulan. Analisis terdiri dari tiga hal utama yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Adapun penjelasan dari model interaktif ini yakni sebagai berikut (Muhammad Idrus, 2007:181-182) :

1. Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan proses yang berlangsung sepanjang penelitian, dengan menggunakan seperangkat instrumen yang telah disiapkan, guna memperoleh informasi data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.
2. Reduksi Data

Proses reduksi diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

3. *Display Data* (Penyajian Data)

Display Data (Penyajian data) adalah usaha merangkai informasi yang terorganisir dalam upaya menggambarkan kesimpulan dan mengambil tindakan.

4. Verifikasi dan Menarik Kesimpulan

Merupakan aktivitas analisis dimana pada awal pengumpulan data seorang analisis mulai memutuskan apakah sesuatu bermakna atau tidak mempunyai keteraturan, pola, penjelasanm kemungkinan konfigurasi, hubungan sebab akibat dan proposisi.

Hasil Penelitian

Memberdayakan masyarakat

Dalam memberdayakan masyarakat kepala kampung meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani melalui penyuluhan pertanian guna meningkatkan pengetahuan petani guna menambah wawasan petani dan dapat memberikan solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi petani sehingga dapat meningkatkan kualitas hasil pertanian warga, sedangkan pengadaan peralatan dimaksudkan untuk meningkatkan dan mempercepat hasil produksi petani, dengan meningkatnya hasil produksi petani maka akan meningkatkan kesejahteraan petani dengan bertambahnya pendapatan warga.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan dapat diketahui bahwa petinggi dalam memberdayakan masyarakat di kampung linggang amer lebih kepada memberdayakan petani yang merupakan matapencaharian sebagian besar warga kampung. Petinggi dalam memberdayakan masyarakat dengan memberikan meningkatkan pengetahuan dan wawasan warga melalui penyuluhan pertanian serta memberikan peralatan teknologi tepat guna. Pemberdayaan masyarakat telah berjalan dengan baik hal itu dapat dilihat dari meningkatnya hasil produksi pertanian warga sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dengan bertambahnya penghasilan warga.

Memberdayakan lembaga kemasyarakatan di kampung

Salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di kampung adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat dengan prinsip-prinsip kesukarelaan, kemandirian dan keragaan, karakteristiknya terdiri dari lembaga kemasyarakatan yang berbasis kewilayahan, keagamaan, profesi, kebudayaan, kepemudaan, gender, dan interest/group. Lembaga kemasyarakatan merupakan mitra kepala kampung dalam memberdayakan masyarakat kampung, lembaga kemasyarakatan yang ada di kampung linggang amer terdiri dari RT, PKK, LPMK, Lembaga adat kampung, dan Karang taruna. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di kampung sangat diperlukan agar lembaga kemasyarakatan dapat menjalankan

tugas dan fungsinya dengan baik, dalam hal ini petinggi memberikan bimbingan, arahan dan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai mitra petinggi dalam pemberdayaan masyarakat di kampung.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan dapat dilihat diketahui bahwa petinggi dalam memberdayakan lembaga kemasyarakatan yang ada di kampung adalah dengan memberikan arahan agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik terutama sebagai mitra petinggi dalam memberdayakan masyarakat, sejauh ini lembaga kemasyarakatan yang telah mendapatkan arahan sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik terutama membantu petinggi dalam pelayanan kepada masyarakat, pendataan penduduk, sebagai wadah aspirasi masyarakat kampung.

Melestarikan lingkungan hidup

Dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada di kampung seperti penambangan pasir dan kerikil di hulu sungai dan pembukaan lahan pertanian milik warga harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, petinggi dalam menjaga kelestarian lingkungan adalah dengan memberikan pemahaman kepada warga agar tidak melakukan eksploitasi yang berlebihan dan juga seharusnya petinggi membuat peraturan yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di kampung agar masyarakat dapat terus merasakan manfaat dari sumber daya alam yang ada seperti tersedianya air untuk lahan pertanian dan persawahan dan juga mencegah terjadinya banjir akibat kerusakan lingkungan.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan diketahui bahwa petinggi dalam memberdayakan masyarakat dengan melestarikan lingkungan hidup belum ada upaya sama sekali seperti memberikan himbauan kepada warga maupun menetapkan aturan yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan dari kerusakan akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan.

Faktor pendukung petinggi dalam pemberdayaan masyarakat

Peran petinggi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pemberdayaan masyarakat di kampung linggang amer terdapat beberapa faktor yang menjadi pendukung petinggi dalam pemberdayaan masyarakat kampung, yang dimaksud dengan faktor pendukung peran petinggi adalah yang menjadi bantuan, yang memudahkan atau dukungan kepada petinggi dalam memberdayakan masyarakat kampung.

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa petinggi dalam memberdayakan masyarakat terdapat beberapa faktor pendukung antara lain tingginya kesadaran masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat seperti dalam mengikuti penyuluhan pertanian yang disampaikan oleh penyuluh pertanian lapangan dan juga yang jadi faktor pendukung adalah adanya dukungan dari dinas pertanian kabupaten kutai barat untuk memberikan penyuluhan kepada warga.

Faktor penghambat peran petinggi dalam pemberdayaan masyarakat

Petinggi dalam memberdayakan masyarakat juga terdapat hambatan-hambatan dalam proses pemberdayaan masyarakat, faktor penghambat peran petinggi yang dimaksud adalah halangan atau rintangan petinggi dalam memberdayakan masyarakat kampung.

Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber dapat diketahui bahwa faktor penghambat petinggi dalam pemberdayaan masyarakat antara lain adalah rendahnya sumber daya manusia aparatur kampung sehingga tidak bisa memberikan penyuluhan kepada masyarakat namun penyuluhan pertanian tetap dapat dilaksanakan dengan adanya dukungan dari dinas pertanian yang memiliki kompetensi dalam memberikan penyuluhan pertanian kepada petani, selain itu terbatasnya anggaran kampung juga menjadi faktor penghambat petinggi dalam pemberdayaan masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan apa yang diuraikan penulis pada bab sebelumnya, berikut kesimpulan tentang peran petinggi dalam memberdayakan masyarakat dikampung linggang amer kecamatan linggang bigung kabupaten kutai barat.

1. Memberdayakan masyarakat petinggi berperan dalam meningkatkan pengetahuan warga dengan memberikan penyuluhan pertanian dan juga penerapan teknologi tepat guna seperti pemberian peralatan pertanian traktor tangan dan juga alat perontok padi agar masyarakat kampung yang sebagian besar matapencaharian sebagai petani dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam bertani selain itu juga dengan penerapan teknologi tepat guna pertanian dapat memudahkan petani dalam proses penyiapan lahan hingga proses panen sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan warga kampung.
2. Memberdayakan lembaga kemasyarakatan di kampung petinggi berperan dalam memberikan arahan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di kampung seperti ketua rukun tetangga (RT) dan juga kepada ketua lembaga pemberdayaan masyarakat kampung (LPMK) agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya khususnya sebagai mitra petinggi dalam pemberdayaan masyarakat di kampung sehingga kedua lembaga kemasyarakatan ini dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik seperti menampung aspirasi masyarakat dalam pembangunan dan membantu petinggi dalam tugas pelayanan administrasi seperti pendataan penduduk serta sebagai wadah aspirasi masyarakat.
3. Melestarikan lingkungan hidup petinggi belum berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup hal tersebut dapat dilihat dari belum ada upaya dari petinggi seperti himbauan maupun membuat peraturan yang mengatur agar masyarakat tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan akibatnya dampak dari kerusakan alam mulai dirasakan oleh warga.

4. Faktor-faktor pendukung dan penghambat peran petinggi dalam pemberdayaan masyarakat di kampung linggang amer antara lain: yang menjadi faktor pendukung peran petinggi dalam pemberdayaan masyarakat di kampung linggang amer kecamatan linggang bigung kabupaten kutai barat antara lain adalah tingginya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan adanya dukungan dari pemerintah kabupaten dalam hal ini adalah dinas pertanian yang bersedia memberikan penyuluhan kepada petani. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat peran petinggi dalam pemberdayaan masyarakat antara lain: rendahnya sumber daya aparatur kampung dan terbatasnya anggaran kampung dalam pemberdayaan masyarakat kampung.

Saran

1. Memberdayakan masyarakat kampung petinggi juga seharusnya memberdayakan petani karet dan juga petani komoditas lainnya tidak hanya fokus dalam memberdayakan petani padi sawah agar semua masyarakat bisa merasakan manfaat dari pemberdayaan masyarakat.
2. Memberdayakan kelembagaan masyarakat kampung petinggi juga semestinya tidak hanya berperan dalam memberdayakan RT dan LMPK saja tapi juga memberdayakan PKK, Lembaga Adat Kampung dan juga Karang Taruna karena semua lembaga tersebut juga merupakan mitra petinggi dalam pemberdayaan masyarakat di kampung
3. Melestarikan lingkungan hidup petinggi harus segera berperan dalam melestarikan lingkungan hidup dengan cara memberikan himbauan dan pemahaman kepada warga serta dibuatnya peraturan yang mengatur warga agar tidak berlebihan dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam di kampung sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta
- Berry, David, 2003. *Pokok-Pokok Pemikiran dalam Sosiologi*. Raja Gravindo, Persada: Jakarta
- Bintoro, Tjokroamidjojo 2000, *Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)*, UI Press Jakarta
- Miles, Matthew B. A. Michael Huberman, 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Moleong Lexy J, 2009. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung Remaja Rosdakarya
- Nurcholis, Hanif, 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa..* Erlangga. Jakarta.
- Prasadja, Buddy, 2006. *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya*. Rajawali Pers, Jakarta

- Rivai, Veithzal, 2006. *“Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi”*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suharto, 2014. *“membangun masyarakat memberdayakan rakyat”* reflika aditama. Bandung
- Sondang P. Siagian, 2003. *Administrasi pembangunan: konsep, dimensi, dan strateginya*. Bumi Aksara. Jakarta
- Siswanto, 2012. *Pengantar manajemen*. Bumi Aksara. Jakarta
- Soerjono, Soekanto, 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*, CV Rajawali Jakarta
- Thoha, Miftah. 2005. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Wardiyanto. 2006. *Metode Penelitian Pariwisata*. Jakarta Penerbit. Andi
- Widjaja, 2008. *Otonomi Desa : Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Rajawali pers. Jakarta
- Widodo, 2001, *Kamus ilmiah Populer Absolut*, Yogyakarta.
- Winardi, J. 2003. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wursanto. 2002. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Dokumen

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa